

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kota Kupang adalah salah satu Kota di Nusa Tenggara Timur dan merupakan ibu Kota provinsi. Kupang juga merupakan Kota terbesar di Pulau Timor, yang terletak di pesisir Teluk Kupang disebelah barat laut Pulau Timor. Pendapatan Kupang berasal dari pajak daerah dan pendapatan pariwisata.
2. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang adalah kemandirian keuangan pemerintah daerah yang masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia untuk memahami pentingnya menyusun pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018-2021, pendapatan transfer atau pendanaan ke pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dari pendapatan asli daerah. Akibatnya, pemerintah Kota Kupang sendiri memiliki sumber daya keuangan yang lebih lemah dan lebih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018-2021 menunjukkan peran pemerintah pusat lebih besar dalam bentuk pemberian pendapatan transfer karena Kota Kupang belum mampu menjalankan otonomi daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

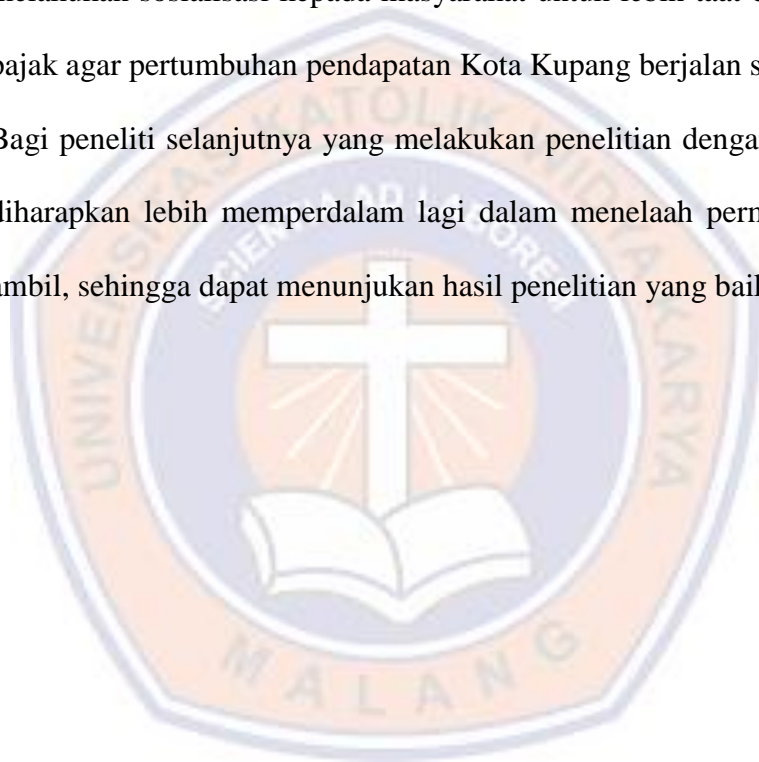
## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Rasio Ketergantungan keuangan Kota Kupang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer berupa dana bagi hasil, dana sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi-fisik, dana alokasi- non fisik dalam bantuan finansial dari pemerintah provinsi lainnya.
5. Rasio Efektivitas PAD Kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2021 menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Ratarata persentase efisiensi PAD Kota Kupang adalah 95,29% selama empat tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa PAD Kota Kupang cukup efektif yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang sangat memperhatikan pengelolaan keuangan.
6. Rasio Efisiensi PAD Kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2021 ditunjukkan sebagai perbandingan antara biaya pemerolehan PAD dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan persentase rata-rata 2,73% selama empat tahun terakhir, rasio ini menunjukkan bahwa PAD Kota Kupang sangat efisien. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang sangat memperhatikan pengelolaan keuangan.
7. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer merupakan komponen pertumbuhan pendapatan keuangan Kota Kupang, yang berfultuasi, karena dampak pandemi COVID-19, transfer pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi jika di lihat dengan Pendapatan Asli Daerah.

## B. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi berikut berdasarkan temuan tersebut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang, jika dilihat dari tingkat Kemandirian, ketergantungan, dan pertumbuhan pendapatan daerah belum terlalu baik akan tetapi dilihat dari efektivita dan efisiensi sudah cukup baik. Namun, perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari penerimaan pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih taat dalam pembayaran pajak agar pertumbuhan pendapatan Kota Kupang berjalan secara lancar.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan lebih memperdalam lagi dalam menelaah permasalahan yang di ambil, sehingga dapat menunjukan hasil penelitian yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id/50869/> Pada 10 Februari 2023.
- Andriani, R. Neneng Rina; & Wahid, Nisa Noor. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, volume 13 No.1. Diakses dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/708/458> Pada 30 Juni 2023.
- Bratakusmah, Deddy Supriady; Solihin, Dadang. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Badrudin, Rudi. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017. 98.
- Harahap, Junita Putri Rajana, dan Nasution, Murni Dahlena 2019. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 8 No 1. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/22406> Pada 10 Februari 2023.
- Ika, Fitriyani; Sumbawatu, Novi Kadewi; dan Puspita, Bintang 2019. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 7 No 7. Diakses dari <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/519> Pada 10 Februari 2023.
- Ishak, Jouzar Farouq; Megawati, Lokita Rizky, dan Fadilla, Achmad 2020. Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Seminar Nasional Terhadap Inovatif, Volume 6 No. 2. Diakses dari <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/393> Pada 10 Februari 2023.
- Loni, Nasly Betsyeba Mahalia; Angi, Yohana Febiani, Dan Tungga, Cicilia A. 2021. Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Akuntansi, Volume 10 No 1. Diakses dari <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/view/8688> Pada 10 Februari 2023.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI, 2002. Diakses dari <https://onesearch.id/Record/IOS3358.OBATM-11120000000003> Pada 30 Juni 2023.
- Oki, Kamilaus Konstanse; Nalle, Frederic W; dan Meomanu, Pricilia A.V 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 5 No 2. Diakses dari <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584> Pada 10 Februari 2023
- Periansya 2019. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Volume 05 No 2 Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/396609-none-82331cb9.pdf> Pada 10 Februari 2023
- Ramadhan, Fikry Nugraha. 2018. Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat. Skripsi Universitas Negeri Makassar. Diakses dari <http://eprints.unm.ac.id/11817/> Pada 6 Juni 2023.
- Roychana , Hafida 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Riset Daerah, Volume XXII No 4. Diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+KEMANDIRIAN+KEUANGAN+DAERAH+KABUPATEN+BANTUL+TAHUN+ANGGARAN+2016-2020&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+KEMANDIRIAN+KEUANGAN+DAERAH+KABUPATEN+BANTUL+TAHUN+ANGGARAN+2016-2020&btnG=) Pada 10 Februari 2023.
- Ruliana, Titin. 2015. Revenue Independence Of East Kalimantan Province, Indonesian. Journal of Asian Scientific Research. Volume 5 No.7. Diakses dari <https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/3734/5900> Pada 30 Juni 2023.
- Sanga, Konstantinus Pati; dan Jaeng, Wihelmina Maryetha Yulia 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Jurnal Pendidikan, Volume 05 No 2. Diakses dari <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/916> Pada 10 Februari 2023.
- Soviana, Amelia; dan Suparno, Suparno 2021. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Volume 6 No 2. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/459948/analisis-kemandirian-dan-efektivitas-keuangan-daerah-pada-kabupatenkota-di-provi> Pada 10 Februari 2023.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Suparmoko. 2006. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: ANDI, 2006. Diakses dari <https://onesearch.id/Author/Home?author=M.+Suparmoko#> Pada 30 Juni 2023.
- Suseno, Dedy Aji 2013. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. Economics Development Analysis Journal, volume 2 No.2, Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/1710> Pada 30 Juni 2023.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf> Pada 10 Februari 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014. Diakses dari [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/UU\\_23\\_2014.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf) Pada 10 Februari 2023.
- Wahab, La Ode Abdul; Rofingatun, Siti; dan Kreuta, Balthazar 2017. Analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Volume 2 No. 3. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=899536&val=14157&title=ANALISIS%20KEMAMPUAN%20KEUANGAN%20DAERAH%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20JAYAPURA> Pada 6 Juni 2023.
- Woestho, Choiroel; Sulistyowati, Ari; dan Sari, Rycha Kuwara 2020. Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 6 No 2. Diakses dari <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/625> Pada 10 Februari 2023